MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan), Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70732, www.pttun-banjarmasin.go.id, pttun.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru, 28 Juli 2026

Nomor : 1133/ KPTTUN.W6-TUN/PR.01.04/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Di – Jln. Tjilik Riwut No.Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimaksudkan untuk:
   a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memperoleh nilai sebesar 69,05 atau B (kategori).
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024		Tahun 2025	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,90		21,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00		21,00	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,70		10,80	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00		16,25	
Nilai Akuntabilias Kinerja			80,10		69,05	
			Predikat	A	Predikat	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen rapat penetapan RENSTRA 2025-2029
2.	Cascading & Crosscutting masih menggunakan yang IKU lama serta belum melampirkan program kerja tahun 2025
3.	Belum tersedianya jadwal MONEV Capaian Kinerja
4.	Dokumen Rencana Aksi (Dokumen Rencana Aksi sudah tersedia, namun tidak terdapat SK Penetapan Renstra 2025-2029)
5.	Belum terdapat analisa IKU terhadap Kriteria SMART dan pernyataan IKU telah memenuhi kriteria SMART,
6.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, Dimana terdapat target yang capaianya tidak 100% yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan dengan capaian 99,83 dan Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun dengan capaian 98,82
7.	Belum teridentifikasikan secara spesifik atas terjadinya crosscutting antar bagian yang saling berkaitan dalam mencapai kinerja organisasi
8.	Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Belum tersedianya SOP SURVEY
9.	Belum adanya terlihat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berdasarkan hasil monev yang telah dilakukan. Dimana masih terdapat target yang capaianya tidak 100% yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan dengan capaian 99,83 dan Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun dengan capaian 98,8
B. Pengukuran Kinerja	
1	Belum Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja berdasarkan analisa IKU terhadap Kriteria SMART dan pernyataan IKU telah memenuhi kriteria SMART,
2	Belum terdapat mekanisme yang jelas berupa SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
3	Dokumen yang dilampirkan tidak menggambarkan keterlibatan pimpinan yaitu Ketua Pengadilan Sebagai pimpinan satuan kerja
4	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional namun dapat membuat dokumen rencana pengembangan pegawai
5.	Matrik perubahan revisi dokumen PK, RKT belum tersedia
C. Pelaporan Kinerja	
1	Dokumen Laporan Kinerja tbelum sepenuhmya disampaikan tepat waktu. Dimana publish Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada website PTUN Palangkaraya pada tanggal 4/23/2026 dan pada aplikasi e Batara MA di upload pada tangal 4 mei 2026
2	Dokumen Laporan Kinerja tidak mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Belum adanya belum ada : 1. perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; 2. tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Benchmark Kinerja dalam hal ini membandingkan capaian PTUN Palangkaraya Dengan SATKER PTUN lainnya; 2. laporan belum menggambarkan/mengidentifikasi upaya nyata dan/atau hambatannya terdapat pada penjelasan masing-masing capaian indikator; 3. tidak menggambarkan/ mengidentivikasi upaya nyata dan penyempurnaan kinerja kedepan
3	Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
4	Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Benchmark Kinerja dalam hal ini membandingkan capaian PTUN Palangkaraya Dengan SATKER PTUN lainnya
5	Dalam laporan belum menggambarkan/mengidentifikasi upaya nyata dan/atau hambatannya terdapat pada penjelasan masing-masing capaian indikato
6	Dalam laporan sudah menginfokan upaya perbaikan namun belum menggambarkan/mengidentivikasi upaya nyata dan penyempurnaan kinerja kedepan
7	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan secara berjenjang.
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan akan tetapi belum dilakukan secara mendalam dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja, bukti dukung belum melapirkan laporan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja internal
4	Belum adanya peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
5	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. hal ini dapat dilihat dari adanya capaian yang tidak maksimal (<100%

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1	Agar dalam hal penetapan RENSTRA diikuti oleh seluruh ASN yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan Membuat surat keputusan Penetapan RENSTRA
2	Agar membuat dan menetapkan jadwal MONEV Capaian Kinerja
3	Membuat analisa IKU terhadap Kriteria SMART, serta membuat kerangka logis yang dapat mengidentifikasikan secara spesifik atas terjadinya Crosscutting antar bagian yang saling berkaitan dalam mencapai kinerja organisas
4	Dalam hal perencanaan kinerja memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan jika ada perubahan dapat melakukan reviu
5	Hasil monev capaian kinerja agar menjadi dasar perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan
B. Pengukuran Kinerja	
1	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yang berdasarkan data kinerja baik melalui Teknologi Informasi (Aplikasi) ataupun manual
2	Membuat SOP pengumpulan data kinerja
3	Pimpinan agar selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja yang dapat dibuktikan dengan dokumen rapat penetapan perencanaan dan pengukuran kinerja yang melibatkan pimpinan
	Mengumpulkan data kinerja / dukumen sumber berdasarkan IKU yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja secara berkala
	Membuat dokumen rencana pengembangan pegawai untuk menunjang penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
	Dalam hal terjadinya revisi dokumen agar membuat matrik perubahan semula-menjadi
C. Pelaporan Kinerja	
1	Agar memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen
2	Dokumen Laporan Kinerja periode selanjutnya agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
3	Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Benchmark Kinerja dalam hal ini membandingkan capaian PTUN Palangkaraya Dengan SATKER PTUN lainnya, menggambarkan/mengidentifikasi upaya nyata dan/atau hambatannya terdapat pada penjelasan masing-masing capaian indikator, dan upaya perbaikan namun belum menggambarkan/mengidentivikasi upaya nyata dan penyempurnaan kinerja kedepan
4	laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, menginformasikan terkait analisis keberhasilan atau kegagalan dan menyertakan solusi yang dilakukan)
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang dari tiap-tiap bagian
2	Memamfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja
3	Mengusulkan ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat tentang SAKIP
4	Dalam implementasi SAKIP agar memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
5	Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan data-data capaian tahun sebelumnya dan monev capaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Terhadap hasil evaluasi atas kinerja tersebut Saudara/i diminta menyusun laporan hasil tindaklanjut evaluasi paling lambat pada bulan September 2026 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

EVITA MAWULAN AKYATI
NIP. 196102091986032001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.